

Analisis Kelayakan Dan Strategi Pengembangan Wilayah Dalam Wacana Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Sumatera Tengah

Akbar Yudha Baskara¹, Alpon Satrianto²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia.

*Korespondensi: baskaraakbaryudha@gmail.com, alponsatrianto@fe.unp.ac.id

Info Artikel

Diterima:

10 Juni 2026

Disetujui:

30 Juni 2026

Terbit daring:

15 Juli 2026

DOI: -

Sitasi:

Baskara, A.Y. & Satrianto, A. (2026). Analisis Kelayakan Dan Strategi Pengembangan Wilayah Dalam Wacana Pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Sumatera Tengah.

Abstract:

The discourse on the establishment of Central Sumatra Province aims to assess regional feasibility and formulate development strategies for a prospective autonomous region (DOB). This study applies a descriptive quantitative approach using a scoring method based on Government Regulation Number 78 of 2007. Supporting analyses include fiscal autonomy degree, Location Quotient (LQ), Klassen Typology, and SWOT analysis. The findings show that the proposal has been submitted by community leaders, but no official approval has been issued by the central government. Technically, all proposed regions, namely Sijunjung, Dharmasraya, South Solok, Kuantan Singingi, Kerinci, Bungo, and Sungai Penuh City, have not met the feasibility threshold during 2020-2024, particularly in regional potential and financial capacity indicators. Fiscal independence remains low, averaging only 9.01%, indicating strong dependence on central government transfers. The regional economy is still dominated by the primary sector, except in Sungai Penuh City and Bungo Regency, where the service sector is more developed. Therefore, strengthening fiscal capacity, optimizing local revenue, downstream leading commodities, and improving human resources and infrastructure should become priorities before regional expansion is implemented.

Keywords: regional autonomy, feasibility analysis, fiscal independence, regional typology, SWOT.

Abstrak:

Wacana pembentukan Provinsi Sumatera Tengah bertujuan menilai kelayakan dan menyusun strategi pengembangan wilayah sebagai calon daerah otonom baru (DOB). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode skoring berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Analisis pendukung meliputi derajat otonomi fiskal, Location Quotient (LQ), Tipologi Klassen, dan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usulan pembentukan provinsi telah diajukan oleh tokoh masyarakat, tetapi belum memperoleh keputusan resmi dari pemerintah pusat. Secara teknis, seluruh wilayah usulan, yaitu Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, Solok Selatan, Kuantan Singingi, Kerinci, Bungo, dan Kota Sungai Penuh, belum memenuhi ambang batas kelayakan periode 2020-2024, terutama pada aspek potensi daerah dan kemampuan keuangan. Tingkat kemandirian fiskal juga masih rendah dengan rata-rata 9,01%, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Struktur ekonomi wilayah masih didominasi sektor primer, kecuali Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Bungo yang lebih berkembang pada sektor jasa. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fiskal, optimalisasi PAD, hilirisasi komoditas unggulan, serta peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur perlu diprioritaskan sebelum pembentukan DOB direalisasikan.

Kata Kunci: otonomi daerah, analisis kelayakan, kemandirian fiskal, tipologi wilayah, SWOT.

Kode Klasifikasi JEL: H77,R58,H71,R11,C44

PENDAHULUAN

Pembentukan daerah otonom baru merupakan instrumen kebijakan desentralisasi yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, wacana pembentukan Provinsi Sumatera Tengah muncul sebagai respons terhadap kebutuhan

pemerataan pembangunan di kawasan yang mencakup Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Bungo.

Gagasan ini pertama kali diinisiasi secara formal melalui surat yang dikirimkan pada 27 Oktober 2022 oleh H. Zulfikar Atut, DT. Penghulu Besar dan H. Masful selaku tokoh masyarakat Sumatera Barat, yang ditujukan kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, serta para gubernur Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Meskipun mendapat tanggapan dari kepala daerah terkait, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat maupun provinsi mengenai pembentukan provinsi tersebut.

Pembentukan daerah otonom baru di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Regulasi ini menetapkan persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan yang harus dipenuhi sebagai prasyarat pembentukan. Secara teoritis, otonomi daerah yang efektif mensyaratkan kapasitas fiskal yang memadai, struktur ekonomi yang beragam, dan kesiapan kelembagaan yang kuat (Farida, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelayakan teknis calon Provinsi Sumatera Tengah berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007, menganalisis kemandirian fiskal dan struktur ekonomi wilayah, serta merumuskan strategi pengembangan wilayah menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan empiris bagi pengambil kebijakan dalam mempertimbangkan kelayakan pembentukan daerah otonom baru tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memadukan analisis kelayakan dan perumusan strategi pengembangan wilayah. Analisis kelayakan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang meliputi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan fisik kewilayahan. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang sistematis, objektif, dan terukur mengenai kesiapan calon Provinsi Sumatera Tengah sebagai daerah otonom baru.

1. Analisis persyaratan administratif dilakukan dengan mengkaji aspirasi masyarakat yang tercermin melalui dukungan pemerintah daerah dan lembaga terkait. Penilaian aspek ini didasarkan pada dokumen resmi, kajian akademik, serta kebijakan daerah yang berkaitan dengan usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tengah. Analisis tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan dukungan administratif dan kelembagaan dalam mendukung proses pemekaran wilayah.
2. Persyaratan teknis dianalisis berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, meliputi kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, kondisi sosial budaya dan sosial politik, luas wilayah, pertahanan dan keamanan, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta rentang kendali pemerintahan. Setiap indikator dinilai menggunakan metode skoring guna menghasilkan ukuran kelayakan yang lebih objektif dan terukur bagi daerah calon pembentuk.
3. Analisis persyaratan fisik kewilayahan dilakukan dengan mempertimbangkan cakupan wilayah, kesiapan calon ibu kota provinsi, serta ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan. Analisis ini bertujuan menilai kesiapan wilayah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik apabila daerah otonom baru dibentuk. Secara keseluruhan, ketiga analisis tersebut menjadi dasar yang komprehensif untuk menilai kelayakan pembentukan Provinsi Sumatera Tengah.

Untuk memperkuat hasil analisis kelayakan, penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis pendukung. Analisis derajat otonomi fiskal digunakan untuk mengukur kemampuan fiskal daerah melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah, yang mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Selain itu, analisis Location Quotient digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis dan sektor non-basis sebagai dasar penilaian potensi ekonomi wilayah, sedangkan analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengklasifikasikan wilayah berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita ke dalam kategori wilayah cepat maju dan tumbuh, maju tetapi tertekan, berkembang cepat, dan relatif tertinggal.

Tahap akhir penelitian dilakukan dengan analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan wilayah. Analisis ini mengkaji faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang dihadapi wilayah (Legionosuko et al). Hasil analisis SWOT digunakan sebagai dasar penyusunan arahan strategi pengembangan wilayah pada calon Provinsi Baru Sumatera Tengah.

Penelitian ini berlokasi pada wilayah yang diwacanakan sebagai calon Provinsi Baru Sumatera Tengah, yang meliputi Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Kuantan Singingi. Waktu penelitian disesuaikan dengan ketersediaan data sekunder serta proses pengumpulan data dari instansi terkait.

Analisis Prospek Pembentukan Calon Daerah Otonom Provinsi Sumatera Tengah

Sebagai pembanding dalam dalam pemberian skor calon daerah otonomi baru pemekaran/pembentukan calon Provinsi Sumatera Tengah diantaranya adalah Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo namun dipilih disesuaikan dengan karakteristik calon wilayah Sumatera Tengah faktor yang dinilai. Adapun teknik skoring diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap indikator pada masing-masing faktor dinilai menggunakan skala skor 1 sampai 5 untuk menunjukkan tingkat kemampuan daerah. Skor 5 termasuk kategori sangat mampu, skor 4 mampu, skor 3 kurang mampu, skor 2 tidak mampu, dan skor 1 sangat tidak mampu.
2. Pemberian skor didasarkan pada perbandingan nilai indikator dengan nilai rata-rata pembanding dan besaran jumlah kuota. Skor 5 diberikan apabila nilai indikator $\geq 80\%$ dari nilai rata-rata, skor 4 apabila $\geq 60\%$, skor 3 apabila $\geq 40\%$, skor 2 apabila $\geq 20\%$, dan skor 1 apabila $< 20\%$ dari nilai rata-rata pembanding. Sistem skoring ini digunakan untuk menghasilkan penilaian kelayakan yang objektif dan terukur.

Tabel 1. Faktor dan Indikator persyaratan teknis Pembentukan Daerah Otonomi Baru berdasarkan PP No.78 Tahun 2007

FAKTOR	BOBOT	Nilai Minimal
Kependudukan	20	Nilai Minimal 80
Kemampuan Ekonomi	15	Nilai Minimal 60
Potensi Daerah	15	Nilai Minimal 60
Kemampuan Keuangan	15	Nilai Minimal 60
Sosial Budaya	5	-
Sosial Politik	5	-
Luas Daerah	5	-
Pertahanan	5	-
Keamanan	5	-
Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	5	-

Rentang Kendali	5	-
Total	100	

Sumber: Nurhasanah et al.,2018

Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator, dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 2. Kategori nilai kelulusan

Kategori	Total Nilai Indikator	Keterangan
Sangat Mampu	420 s/d 500	Rekomendasi
Mampu	340 s/d 419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260 s/d 339	Ditolak
Tidak Mampu	180 s/d 259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100 s/d 179	Ditolak

Sumber: Nurhasanah et al.,2018

Usulan pembentukan daerah otonom baru dinyatakan tidak layak apabila calon daerah otonom maupun daerah induknya memperoleh total nilai dalam kategori kurang mampu, tidak mampu, atau sangat tidak mampu. Usulan juga ditolak apabila tidak memenuhi batas minimal pada faktor-faktor utama, yaitu skor kependudukan kurang dari 80, kemampuan ekonomi kurang dari 60, dan potensi daerah kurang dari 60. Ketiga faktor tersebut menjadi persyaratan dasar dalam penilaian kelayakan pembentukan daerah otonom baru.

Analisis Derajat Kemandirian Fiskal

Untuk menganalisis tingkat kemandirian fiskal suatu daerah digunakan alat analisis desentralisasi fiskal, yaitu :

$$DOF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

DOF :Derajat Otonomi Fiskal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

TPD : Total Penerimaan Daerah (PAD + DBH+DAU+DAK)

Tabel 3.Interval Derajat Otonomi Fiskal

PAD/TPD (%)	Kemampuan Keuangan
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,01	Sangat Baik

Sumber: Nurhasanah et al.,2018

Analisis Komparatif Wilayah

Untuk mengidentifikasi sektor basis dan non-basis dalam perekonomian suatu wilayah, salah satu teknik analisis yang umum digunakan adalah Location Quotient (LQ). Menurut (Jumiyanti, 2018), analisis LQ digunakan untuk mengukur kemampuan relatif suatu sektor ekonomi di wilayah tertentu dibandingkan dengan kemampuan sektor yang sama pada wilayah yang lebih luas sebagai daerah acuan. Teknik Location Quotient (LQ) digunakan untuk membandingkan kontribusi suatu sektor terhadap PDRB wilayah studi dengan wilayah referensi. Nilai LQ lebih dari satu menunjukkan sektor basis yang memiliki keunggulan relatif

dan potensi ekspor, sedangkan nilai kurang dari satu menunjukkan sektor non-basis yang terutama melayani kebutuhan internal wilayah. Dalam penelitian ini, analisis LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor unggulan sebagai penggerak utama perekonomian daerah.

Untuk mengetahui potensi aktivitas ekonomi yang merupakan sektor basis dan non-basis dapat digunakan metode location quotient (LQ), rumusnya adalah sebagai berikut :

$$LQ = \frac{xi/PDRBKab \text{ atau Kota}}{Xi/PDRBProv} \dots\dots\dots(2)$$

di mana:

xi : Nilai sektor i di suatu kabupaten/kota
PDRB Kab Kota : Produk domestik regional bruto kabupaten/kota tersebut
Xi : Nilai sektor i provinsi
PDRB Prov : Produk domestik regional bruto provinsi

Nilai LQ lebih besar dari satu menandakan sektor basis dengan konsentrasi relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah acuan dan berpotensi menghasilkan surplus untuk melayani wilayah lain, sedangkan nilai LQ kurang dari satu menunjukkan sektor nonbasis yang terutama melayani kebutuhan internal wilayah. Oleh karena itu, analisis LQ digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif wilayah melalui penentuan sektor basis dan nonbasis sebagai dasar penyusunan arah dan strategi pengembangan wilayah (Pribadi & Nurbianto, 2021).

Analisis Tipologi Wilayah

Analisis tipologi wilayah digunakan untuk menggambarkan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi antar daerah secara komparatif. Tipologi ini mengelompokkan daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, yang masing-masing mencerminkan dinamika pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan wilayah (Zasriati, 2022). Dengan menjadikan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, wilayah dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu daerah cepat maju dan tumbuh, daerah maju tetapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal. Pendekatan ini banyak digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan struktur ekonomi dan ketimpangan antar wilayah serta sebagai dasar perumusan arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah berbasis karakteristik daerah (Afandi et al., 2019)

Tabel 4. Tipologi Wilayah

Laju Pertumbuhan(r) PDRB per Kapita (y)	(y _i >y)	(y _i <y)
	(y _i >y)	(y _i <y)
(r _i >r)	Pendapatan tinggi(di atas rata-rata) dan pertumbuhan tinggi (di atas rata-rata)	Pendapatan rendah (dibawah rata-rata) dan pertumbuhan tinggi(di atas rata-rata)
(r _i <r)	Pendapatan tinggi(di atas rata-rata) dan pertumbuhan rendah(dibawah rata-rata)	Pendapatan rendah(dibawah rata-rata) dan pertumbuhan rendah(dibawah rata-rata)

Sumber: Zasriati et al.,2022

Keterangan :

r_i : Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten
r : Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi provinsi

yi : Rata-rata PDRB atas dasar harga konstan kabupaten

y : Rata-rata PDRB atas dasar harga konstan provinsi

Analisis Strategi Pengembangan Wilayah

Analisis strategi pengembangan wilayah pada calon Provinsi Sumatera Tengah dilakukan menggunakan analisis SWOT yang meliputi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal wilayah sebagai dasar dalam merumuskan strategi pengembangan yang tepat. Melalui analisis SWOT, strategi dapat disusun dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang serta meminimalkan kelemahan dan ancaman yang dihadapi, sehingga mendukung pengembangan wilayah yang lebih efektif dan berkelanjutan (Kekri & Iriawan, 2024). Tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan (*the decision stage*) untuk menentukan strategi yang akan diterapkan. Tahapan penyusunan analisis SWOT dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Membuat daftar peluang eksternal yang dimiliki daerah.
2. Membuat daftar ancaman eksternal yang dimiliki daerah.
3. Membuat daftar kekuatan internal yang dimiliki daerah .
4. Membuat daftar kelemahan internal yang dimiliki daerah.
5. Berdasarkan poin 1 - 4 akan dapat dirumuskan strategi umum (*Grand Strategy*) strategi alternatif (*alternative strategy*) melalui SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis prospek pembentukan calon daerah daerah otonom Sumatera Tengah

Persyaratan Administratif

Persyaratan Administratif Analisis terhadap persyaratan administratif dilakukan dengan melihat pemberitaan terkait usulan dalam bentuk surat yang di kirimkan pada 27 oktober 2022 oleh H.Zulfikar Atut,DT.Penghulu Besar dan H. Masful selaku tokoh masyarakat Sumatera Barat yang menjadi inisiator berdirinya Provinsi Sumatera Tengah kepada Bapak Presiden RI,Ketua DPR RI,Ketua DPD RI,Gubernur Sumatera Barat,Gubernur Riau,Gubernur Jambi. Sesuai dengan persyaratan pada PP. No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Kepala daerah yang menjabat pada saat itu menanggapi surat usulan/aspirasi dengan namun dengan catatan perlu adanya kajian mendalam terkait pembentukan Provinsi Tengah ini.
2. Belum ada keputusan resmi dari Bapak Presiden RI,Ketua DPR RI,Ketua DPD RI,Gubernur Sumatera Barat,Gubernur Riau,dan Gubernur Jambi yang menjabat pada saat itu.

Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis pembentukan daerah otonom baru dianalisis melalui delapan aspek utama, yaitu kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, kondisi sosial budaya dan sosial politik, luas wilayah, tingkat kesejahteraan masyarakat, serta rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Analisis skoring terhadap aspek-aspek tersebut digunakan untuk menilai kelayakan teknis calon daerah pemekaran secara objektif dan terukur, sebagaimana diterapkan dalam kajian prospek pembentukan daerah otonom baru di Indonesia Pemerintah Indonesia (P.Indonesia, 2007).

Tabel 5.Data Faktor Persyaratan Teknis Calon Daerah Otonomi Baru Provinsi Sumatera Tengah Tahun 2024

No	Faktor	Indikator	Data Kabupaten/Kota Calon Daerah Otonomi Baru Provinsi Sumatera Tengah Tahun 2024						
			Sijunjung	Dharmasraya	Solok Selatan	Kuantan Singingi	Sungai Penuh	Kerinci	Bungo
1	Kependudukan	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	79	82	58	63,99	280,13	78,6	81,8
2	Kemampuan Ekonomi	Laju pertumbuhan PDRB (%)	3,89	3,86	4,09	3,12	5,10	4,57	3,30
3	Potensi Daerah	Kunjungan wisatawan (orang)	274.527	203.131	106.895	62.547	298.824	396.402	778.171
4	Kemampuan Keuangan	Kemandirian fiskal (%)							
5	Sosial Budaya	Indeks Kerukunan (%)	79,2	78,1	78,4	84,23	78,02	77,3	76,95
6	Sosial Politik	Partisipasi Pilkada/Pemilu (%)	71,4	57,29	77,82	76,76	79,35	79,12	75,23
7	Luas Daerah	Luas wilayah (km ²)	3.150,58	2.920,93	3.282,14	7.656,03	364,92	3.445,18	4.659,31
8	Pertahanan	Tidak Ditemukan	-	-	-	-	-	-	-
9	Keamanan	Tingkat kriminalitas (kasus per 1.000 penduduk)	1,1	3,4	1,6	1,3	2,01	2,06	1,41
10	Kesejahteraan	Indeks Pembangunan Manusia	72,88	74,82	73,17	72,33	77,4	73,11	71,92
11	Rentang Kendali	Rata-rata jarak kecamatan ke pusat pemerintahan (km)	40	55	50	48	5,3	33,6	43,5
	Total Nilai Skoring		310	335	315	330	350	335	355

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Secara keseluruhan, hasil analisis teknis menunjukkan bahwa wilayah calon Provinsi Sumatera Tengah belum sepenuhnya memenuhi ambang batas kelayakan yang diperlukan untuk memperoleh rekomendasi pemekaran pada periode 2020-2024. Rendahnya potensi daerah dan kapasitas fiskal masih menjadi kendala utama yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penguatan ekonomi daerah, peningkatan kemandirian fiskal, serta optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah perlu menjadi prioritas sebelum pembentukan provinsi baru dapat direalisasikan.

Persyaratan Fisik Kewilayahan

Pembentukan calon daerah otonomi baru setidaknya sebuah provinsi memiliki 5 kota/kabupaten yang memungkinkan dalam hal ini ada 7 daerah yang diusulkan yakni Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Bungo. Calon daerah ini belum bersifat tetap dikarenakan belum ada tanggapan resmi dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Analisis Kemandirian Fiskal

Berdasarkan hasil perhitungan derajat otonomi fiskal (DOF), tingkat kemandirian fiskal daerah calon Provinsi Sumatera Tengah secara umum masih tergolong rendah hingga kurang mandiri, dengan rata-rata DOF kawasan sebesar 9,01 persen, yang menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah masih terbatas dan penyelenggaraan pemerintahan sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kabupaten Bungo memiliki tingkat kemandirian fiskal relatif paling tinggi dengan DOF 12,32 persen, diikuti Kabupaten Dharmasraya (10,29 persen) dan Kabupaten Sijunjung (10,20 persen), namun ketiganya masih belum mampu mencapai kategori mandiri. Kabupaten Solok Selatan (9,81 persen) berada pada kondisi fiskal yang lemah, sementara Kabupaten Kuantan Singingi (7,98 persen), Kota Sungai Penuh (7,59 persen), dan Kabupaten Kerinci (4,85 persen) menunjukkan tingkat kemandirian fiskal paling rendah. Secara keseluruhan, kondisi ini menegaskan bahwa kapasitas fiskal wilayah calon Provinsi Sumatera Tengah belum kuat untuk menopang pembentukan daerah otonom baru secara berkelanjutan tanpa strategi penguatan PAD dan diversifikasi sumber pendapatan daerah.

Tabel 6.Rata-rata DOF calon Provinsi Sumatera Tengah

Daerah	Rata-rata DOF(Persen)
Kab.Sijunjung	10,20
Kab.Dharmasraya	10,29
Kab.Solok Selatan	9,81
Kab.Kuantan Singingi	7,98
Kota Sungai Penuh	7,59
Kab.Kerinci	4,85
Kab.Bungo	12,32
Rata-rata DOF Sumatera Tengah (Persen)	9,01

Sumber:Kemenkeu(diolah)

Analisis Komparatif Wilayah

Secara keseluruhan, hasil analisis Location Quotient (LQ) menunjukkan bahwa Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, Solok Selatan, dan Kuantan Singingi masih didominasi oleh sektor primer, terutama pertanian dan pertambangan. Sebaliknya, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Bungo memiliki struktur ekonomi yang lebih terdiversifikasi dengan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor basis. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan fungsi ekonomi antarwilayah, yaitu sebagai wilayah produksi dan wilayah pelayanan. Oleh karena itu, pengembangan sektor sekunder dan tersier di daerah yang masih bergantung pada sektor primer perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan mendukung pembangunan wilayah yang lebih berkelanjutan.

Tabel 7.Rata-rata nilai nilai LQ daerah calon Provinsi Sumatera Tengah

Sektor	Rata-rata Daerah Calon Provinsi Sumatera Tengah (2020-2024)						
	Sijunjung	Dharmasraya	Solok Selatan	Kuantan Singingi	Sungai Penuh	Kerinci	Bungo
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,25	1,3	1,33	1,79	0,18	1,75	0,77
Pertambangan dan Penggalian	3,41	1,38	1,98	0,27	0,04	0,08	0,98
Industri Pengolahan	0,32	0,59	0,51	0,96	0,07	0,27	0,63
Pengadaan Listrik dan Gas	0,36	0,16	0,31	0,59	0,43	0,75	0,75
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	0,42	0,11	0,51	1,39	2,37	2,36	1,59
Konstruksi	1,44	1,44	1,28	0,81	1,65	1,68	1,54
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,8	0,89	1,27	0,37	2,6	0,89	1,21
Transportasi dan Pergudangan	0,71	0,59	0,62	0,64	1,33	0,81	0,83
Penyediaan Akomodasi dan makan minum	0,67	0,76	0,71	0,46	1,02	0,72	2,24
Informasi dan Komunikasi	0,57	1,07	0,82	0,39	3,78	1,87	1,35
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,76	0,73	0,26	0,53	2,34	0,45	1,68
Real Estate	0,62	1,05	0,41	0,72	1,74	1,09	1,59
Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,03	0,16	5,47	0,04	0,18
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,83	1,23	0,83	1,33	1,63	1,59	0,9
Jasa Pendidikan	1,1	0,65	0,59	1,04	2,76	1,24	1,48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,3	1,15	0,84	0,81	2,09	1,31	0,63
RSTU. Jasa lainnya	1,03	0,43	0,66	0,84	2,32	1,52	0,61

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Analisis Tipologi Wilayah

Berdasarkan analisis tipologi, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Bungo berada pada Kuadran IV yang mencerminkan kondisi pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Kabupaten Dharmasraya berada pada Kuadran II, menunjukkan tingkat pendapatan yang relatif tinggi namun pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat ketergantungan pada sektor berbasis sumber daya alam. Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh berada pada Kuadran III, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi namun belum diikuti oleh peningkatan kesejahteraan yang memadai.

Tabel 8. Posisi Kuadran Calon Daerah Provinsi Sumatera Tengah

Daerah	Kuadran
Kab.Sijunjung	Kuadran IV
Kab.Dharmasraya	Kuadran II
Kab.Solok Selatan	Kuadran IV
Kab.Kuantan Singingi	Kuadran III
Kota.Sungai Penuh	Kuadran III
Kab.Kerinci	Kuadran III
Kab.Bungo	Kuadran IV

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan struktural berupa rendahnya diversifikasi ekonomi dan ketimpangan antarwilayah di kawasan calon Provinsi Sumatera Tengah. Penguatan sektor bernilai tambah, peningkatan produktivitas, dan integrasi ekonomi regional menjadi prasyarat penting untuk mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Analisis Strategi Pengembangan Wilayah

Tabel 9. Matriks Analisis SWOT

	OPPORTUNITIES (O)	THREATS (T)
Faktor Eksternal Faktor Internal	O1 Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi terhadap pembangunan kawasan perdesaan, pertanian, dan UMKM.	T1 Ketergantungan tinggi terhadap sektor primer yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim.
	O2 Posisi geografis strategis sebagai wilayah penghubung Sumatera Barat, Riau, dan Jambi yang membuka peluang perdagangan dan konektivitas regional.	T2 Ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat yang membatasi fleksibilitas kebijakan pembangunan daerah.
	O3 Potensi pengembangan agroindustri dan hilirisasi komoditas pertanian dan pertambangan berbasis sektor unggulan daerah.	T3 Kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, dan degradasi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam.
	O4 Pengembangan pariwisata alam dan budaya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi alternatif non-primer.	T4 Persaingan antarwilayah dalam menarik investasi serta keterbatasan kualitas infrastruktur pendukung investasi.
	O5 Peluang percepatan pembangunan infrastruktur melalui program nasional dan skema pembangunan wilayah tertinggal.	T5 Risiko ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah apabila integrasi pembangunan tidak berjalan efektif.
STRENGTHS (S)	Strategi S-O	Strategi S-T
S1 Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, khususnya sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan sebagai sektor basis utama di sebagian besar wilayah.	S-O1 Mengembangkan agroindustri dan hilirisasi komoditas unggulan berbasis sektor basis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi regional.	S-T1 Diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada sektor primer.

S2 Cakupan wilayah luas dengan jumlah penduduk dan luas daerah yang memenuhi persyaratan minimal pembentukan provinsi sesuai PP No. 78 Tahun 2007.	S-O2 Memanfaatkan posisi geografis strategis untuk memperkuat jaringan perdagangan antarprovinsi dan logistik regional.	S-T2 Penguatan perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana di wilayah rawan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
S3 Keberadaan pusat pertumbuhan jasa dan perdagangan di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Bungo sebagai simpul pelayanan regional.	S-O3 Mengintegrasikan pengembangan pariwisata alam dan budaya dengan penguatan UMKM lokal sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru.	S-T3 Pemanfaatan sektor basis sebagai daya tarik investasi dengan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
S4 Pertumbuhan ekonomi relatif tinggi pada beberapa wilayah (Kuadran III), seperti Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh.	S-O4 Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Kab/Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Bungo untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.	S-T4 Mengarahkan pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor yang lebih beragam guna meningkatkan ketahanan daerah terhadap fluktuasi harga komoditas dan perlambatan ekonomi.
S5 Kekayaan budaya lokal dan potensi wisata alam yang tersebar di seluruh wilayah calon Provinsi Sumatera Tengah.	S-O5 Mengembangkan pariwisata alam dan budaya berbasis kearifan lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi alternatif non-primer.	S-T5 Mendorong pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan sekaligus memperluas kesempatan kerja masyarakat lokal.
WEAKNESSES (W)	Strategi W-O	Strategi WT
W1 Tingkat kemandirian fiskal rendah pada sebagian besar daerah, ditandai oleh kontribusi PAD yang kecil terhadap total pendapatan daerah.	W-O1 Optimalisasi program pengembangan UMKM dan ekonomi lokal untuk meningkatkan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.	W-T1 Penguatan kapasitas fiskal daerah secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
W2 Struktur ekonomi masih didominasi sektor primer dengan nilai tambah rendah dan minim hilirisasi.	W-O2 Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan berbasis kebutuhan sektor unggulan dan industri hilir.	W-T2 Penataan prioritas pembangunan wilayah untuk mengurangi ketimpangan dan potensi konflik sosial antarwilayah.
W3 Ketimpangan pembangunan dan infrastruktur antarwilayah, terutama antara wilayah berbasis jasa dan wilayah perdesaan.	W-O3 Pemanfaatan dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal dan perdesaan.	W-T3 Pengurangan risiko ekonomi melalui pengembangan mata pencaharian alternatif di luar sektor primer.
W4 Kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja relatif terbatas di beberapa daerah.	W-O4 Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor unggulan daerah, seperti agroindustri, pariwisata, dan logistik.	W-T4 Peningkatan kapasitas SDM untuk memperkuat daya saing tenaga kerja lokal dan mengurangi kerentanan sosial akibat persaingan investasi antarwilayah.
W5 Tingginya ketergantungan pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan.	W-O5 Optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan sumber pendapatan baru berbasis potensi lokal untuk memperkuat kapasitas fiskal.	W-T5 Penyusunan tahapan penguatan kapasitas fiskal sebagai prasyarat pembentukan daerah otonom baru guna meminimalkan risiko ketidakberlanjutan fiskal.

Berdasarkan analisis SWOT, calon Provinsi Sumatera Tengah memiliki kekuatan berupa sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan, cakupan wilayah serta jumlah penduduk yang telah memenuhi ketentuan PP No. 78 Tahun 2007, serta peran Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Bungo sebagai pusat jasa dan perdagangan. Potensi pariwisata alam dan budaya juga mendukung diversifikasi ekonomi. Namun, wilayah ini masih menghadapi kelemahan berupa rendahnya kemandirian fiskal, dominasi sektor primer bernilai tambah rendah, ketimpangan pembangunan dan infrastruktur, serta kualitas SDM yang belum merata. Dari sisi eksternal, dukungan kebijakan pemerintah, posisi geografis yang strategis, serta peluang pengembangan agroindustri, hilirisasi, dan pariwisata menjadi faktor pendorong pembangunan. Sementara itu, ketergantungan pada sektor primer dan dana transfer pusat, fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, bencana alam, persaingan investasi, dan potensi kesenjangan antarwilayah menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Calon Provinsi Sumatera Tengah

1. Mendorong pengembangan agroindustri dan hilirisasi komoditas unggulan berbasis sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi regional.
2. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Bungo guna mengurangi ketimpangan antarwilayah.
3. Memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur transportasi dan logistik yang terintegrasi lintas provinsi.
4. Meningkatkan kapasitas Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi UMKM, pajak daerah, dan pengelolaan aset daerah secara lebih produktif.
5. Mengarahkan pembangunan pariwisata alam dan budaya berbasis kearifan lokal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi alternatif non-primer.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi dan pendidikan berbasis kebutuhan sektor unggulan daerah.
7. Mengembangkan strategi diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor primer dan komoditas mentah.
8. Memperkuat perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko lingkungan dan kerugian ekonomi jangka panjang.
9. Mendorong integrasi pembangunan antarwilayah dalam kerangka perencanaan provinsi guna menciptakan keterkaitan ekonomi yang saling mendukung.
10. Menyusun tahapan penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai prasyarat utama sebelum realisasi pembentukan daerah otonom baru.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis SWOT, dapat disimpulkan bahwa calon Provinsi Sumatera Tengah memiliki potensi ekonomi dan sumber daya wilayah yang cukup besar untuk dikembangkan, terutama melalui keberadaan sektor-sektor basis serta posisi geografis yang strategis sebagai penghubung antarprovinsi. Namun demikian, kelemahan struktural masih menjadi tantangan utama, khususnya rendahnya tingkat kemandirian fiskal, dominasi sektor primer dengan nilai tambah rendah, serta ketimpangan pembangunan dan infrastruktur antarwilayah. Selain itu, berdasarkan hasil analisis skoring terhadap persyaratan pembentukan daerah otonom baru, hanya Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh yang menunjukkan nilai total skoring mendekati atau hampir memenuhi kriteria kelayakan, sementara kabupaten lainnya masih berada di bawah ambang batas yang dipersyaratkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara agregat, calon Provinsi Sumatera Tengah belum sepenuhnya siap untuk dibentuk tanpa adanya penguatan kapasitas ekonomi, fiskal, dan kelembagaan wilayah. Oleh karena itu, pembentukan Provinsi Sumatera Tengah perlu disertai dengan strategi pengembangan wilayah yang terarah dan bertahap, berbasis peningkatan nilai tambah ekonomi, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta pemerataan pembangunan antarwilayah, agar pembentukan daerah otonom baru dapat mendorong kemandirian dan keberlanjutan pembangunan regional secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

Artikel dalam jurnal

- Afandi, F., Jumiati, A., & Adenan, M. (2019). Analisis Tipologi Wilayah Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Basis Dan Disparitas Pendapatan. *Gorontalo Development Review*, 2(2), 70–81. <https://doi.org/10.32662/Golder.V2i2.563>
- Farida, N. (2021). Fiscal Decentralization, Economic Growth And Regional Development Inequality In Eastern Indonesia. *Journal Of Indonesian Applied Economics*, 9(2), 1–9. <https://doi.org/10.21776/Ub.Jiae.2021.009.02.1>
- Jumiyanti, K. R. (2018). Analisis Location Quotient Dalam Penentuan Sektor Basis Dan Non Basis Di Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Development Review*, 1(1), 29–43. <https://doi.org/10.47521/Selodangmayang.V1oi2.421>

- Kekri, B. P. N., & Iriawan. (2024). Indonesia's Difficults In Regional Finance: A Quantitative Descriptive Approach. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal Of Development Planning*, 8(1), 29–44. <https://doi.org/10.36574/Jpp.V8i1.527>
- Legionosuko, T., Ip, S., Ap, M., Widjayanto, J., Sos, S., Nengah, I., Apriyanto, P., Si, M., Kunto, H.), & Ap, W. (N.D.). *Analisis Adaptif, Dinamisasi Metode Analisis Swot*. Retrieved www.idu.ac.id
- Pribadi, Y., & Nurbiyanto. (2021). Central Lampung Regency Competitiveness Measurement: Location Quotient And Shift-Share Analysis. *Jurnal Kelitbangan*, 9(3), 299–310.
- Zasriati, M. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia Tahun 2010-2020. *Al-Dzahab*, 3(2), 119–131. <https://doi.org/10.32939/Dhb.V3i2.1494>
- Zasriati, M., Tinggi, S., Sakti, I. E., & Kerinci, A. (N.D.). *Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Indonesia Tahun 2010-2020*.

Dokumen lembaga

- Indonesia, P. R. (2007). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2007/78TAHUN2007PP.htm>